

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM LIMA PULUH JUTA PER RT (PROLITA) DI KOTA BONTANG

Bela Trias Putri¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan prolita di 3 Kecamatan Kota Bontang, khususnya di enam lokasi penelitian, kemudian menilai pelaksanaan prolita dengan membandingkan antara persiapan dan pelaksanaan di enam lokasi tersebut untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan prolita dan mendapatkan penyebabnya. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan, kebijakan, program, program prolita.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sebagai sumber data peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan tetap yang dikembangkan oleh Moleong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap persiapan prolita di kota Bontang sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, tahap pelaksanaan prolita di kota Bontang sudah sesuai dengan DPA (Daftar Pengguna Anggaran). Dalam penilaian prolita bahwa perbandingan pelaksanaan prolita tidak menunjukkan perbedaan dalam artian antara persiapan dengan pelaksanaan sudah menunjukkan persamaan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan perbedaan terjadi dalam kegiatan yang dilaksanakan dimana kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan RT dan hasil kesepakatan bersama masyarakat begitupun dengan mekanisme pelaksanaan prolita kemudian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan prolita juga berbeda-beda tergantung bagaimana peran RT dan Kelurahan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan prolita di Kota Bontang dapat dikatakan cukup berhasil dan dapat dilanjutkan.

Kata Kunci : *perbandingan, program, prolita, Bontang*

Pendahuluan

Pembangunan sebagai proses perkembangan dan perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pembangunan dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dilaksanakan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: belatriasputri@gmail.com

masyarakat seperti gedung, jalan, pasar dan infrastruktur lainnya. Sementara itu pembangunan non fisik identik dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemulihan status sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan baik yang berkenaan dengan aspek fisik maupun non fisik saling terkait satu sama lain oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik perlu disinergikan. Keberhasilan dalam pembangunan di tentukan dari partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan material, non material serta keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik.

Dengan digulirkannya pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka, Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah mendapatkan delegasi penuh untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah dengan menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memberdayakan segala kemampuan masyarakat untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Otda menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah*. Begitu juga dengan Kota Bontang sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat kota Bontang ialah masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak meratanya pembangunan infrastuktur di beberapa wilayah khususnya tingkat RT. Dalam melaksanakan Otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan SDM dan mempercepat pembangunan. Dalam Peraturan Daerah kota Bontang No. 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 memuat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode tahun 2011-2016, enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Membangun infrastruktur yang mencakup listrik dan air bersih;
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Bantuan Rp. 50 juta per RT;
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. Peningkatan lingkungan hidup;
- f. Membangun komitmen bersama.

Pemerintah Kota Bontang berupaya merealisasikan salah satu dari enam kebijakan prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bontang dan masih menjadi satu-satunya yaitu Bantuan Rp 50 Juta per RT. Dimana setiap RT disubsidi dana dengan jumlah Rp 50 juta yang digunakan

untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan Prolita merupakan salah satu langkah pelaksanaan dari usaha untuk pemeratakan pembangunan di setiap RT dan untuk mengakomodir pembangunan di wilayah seluruh RT di Kota Bontang dikarenakan kebutuhan pembangunan di setiap RT berbeda-beda. Dengan adanya kebijakan program dana bantuan ini, diharapkan setiap RT mampu mengakomodir dan melaksanakan pembangunan di wilayah RT nya masing-masing sesuai dengan keinginan masyarakatnya.

Untuk meningkatkan pembangunan, seluruh ketua RT yang ada dikelurahan kota Bontang harus memahami betul apa saja yang menjadi kebutuhan dan masalah – masalah *urgent* yang dihadapi oleh setiap RT selain itu ketua RT dalam melakukan perencanaan harus mengikutsertakan seluruh masyarakat di lingkungan RT tanpa terkecuali melalui kegiatan musyawarah (rembug warga) untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan penting di lingkungannya. Sehingga usaha-usaha pembangunan yang berlangsung benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing RT.

Penyaluran dana bantuan Rp 50 juta kepada 498 Rukun Tetangga (RT) disetiap 15 kelurahan yang terbagi dalam tiga (3) Kecamatan yaitu, Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat. Proses penggunaan dana prolita harus melalui musyawarah (rembug warga) untuk mendapat kesepakatan bersama kemudian diajukan rincian data program kegiatan pembangunan ke kelurahan. Melalui musyawarah diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling mengajukan pendapat dan bertukar pikiran agar tidak menimbulkan prokontra di masyarakat. SKPD Kelurahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari segi administrasi fisik dan keuangan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Bontang.

Selama ini, pelaksanaan program lima puluh juta per RT dirasa masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi yaitu masih banyaknya usulan kegiatan yang berupa keinginan bukan kebutuhan, banyaknya perubahan tidak terduga yang terjadi ketika pelaksanaan sehingga harus di rencanakan kembali, jumlah sumberdaya manusia di kelurahan yang terbatas untuk pendampingan dalam rembug warga tidak sebanding dengan jumlah RT yang ada sehingga harus gantian, lambannya proses rembug warga dikarenakan sulitnya proses penyatuan jadwal rembug warga di tingkat RT, masih minimnya sumberdaya manusia dalam memahami dan mengelola dana 50 juta per RT kendala ini membuat lambannya dari RT melakukan penyerahan pengajuan administrasi kepada kelurahan adapula kurangnya partisipasi masyarakat lingkungan RT dalam keikutsertaan kegiatan rembug warga dalam perencanaan prolita tersebut. Kemudian, lambannya pelaksanaan dari kelurahan karna masih banyaknya tugas kelurahan yang belum selesai sertalambannya proses pengadaan perlengkapan barang dari kelurahan kepada RT. Hal ini menyebabkan pembangunan di lingkungan RT menjadi terhambat. Dalam

pelaksanaan Program Lima Puluh Juta per RT masih ada ketidak-merataan pembangunan antar wilayah RT seperti pembangunan infrastruktur, Sosial dan Ekonomi. Tidak seluruhnya masyarakat merasakan manfaat berupa pembangunan dari program tersebut sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar wilayah RT.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dimana masih adanya ketidakmerataan dalam pelaksanaan prolita di beberapa wilayah yaitu pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi sehingga penulis ingin membandingkan pelaksanaan prolita di wilayah kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dalam pelaksanaan diperlukan beberapa tahapan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik yaitu :

1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap penilaian

Program

Tahapan kebijakan publik yaitu:

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap penilaian kebijakan publik

Kebijakan publik adalah suatu tindakan pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui proses yang panjang dalam bentuk peraturan pemerintah tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati pejabat publik dengan tujuan untuk mengatasi persoalan dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah.

Setelah adanya sebuah kebijakan publik, maka hal selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut menjadi sebuah aktivitas nyata melalui sebuah program. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk melakukan suatu kebijakan yang telah terencana

dalam proses pencapaian suatu tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program:

- a. Komunikasi
- b. *Resources* (sumber daya)
- c. *Disposisi*
- d. Struktur Birokrasi

Program Lima Puluh Juta Per RT (Prolita)

Program dana bantuan 50 juta rupiah per-RT (Prolita) merupakan kebijakan pemerintah Kota Bontang berupa program fasilitasi partisipasi masyarakat untuk peningkatan peran serta masyarakat kelurahan melalui pembangunan bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi. Dimana sasaran pelaksanaan program ini adalah seluruh RT yang ada di lingkungan Kota Bontang dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp 50 juta rupiah kepada 498 Rukun Tetangga (RT) disetiap 15 kelurahan yang terdapat di Bontang guna meningkatkan pembangunan dan mengembangkan potensi yang ada disetiap lingkungannya.

Pelaksanaan Program Lima Puluh Juta Per RT (Prolita)

Pelaksanaan program lima puluh juta per RT ialah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah berupa program fasilitasi partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan di kelurahan khususnya pembangunan infrastruktur lingkungan RT, peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang sosial dan ekonomi serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wilayah RT.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklarifikasi dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti dengan metode komparatif.

Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu Perbandingan Pelaksanaan Program Lima Puluh Juta per RT di Kota Bontang, maka penelitian ini akan memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Lima Puluh Juta per RT di enam lokasi penelitian yaitu meliputi:
 - 1.1 Persiapan Prolita (kegiatan rembuk warga, berita acara rembuk warga, dsb).
 - 1.2 Pelaksanaan Prolita (verifikasi usulan, RKA, DPA, pelaksanaan di RTdsb).

1.3 Penilaian Prolita (perbandingan antara persiapan dan pelaksanaan prolita).

Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Ada pun jenis data dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria sebagaimana dipaparkan diatas maka diperoleh informan yang terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Bidang Ekosobud Bappeda Kota Bontang;
- 2) Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Tekonologi Tepat Guna Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Bontang;
- 3) Kepala Kecamatan (Camat) Bontang Selatan, Bontang Utara, Bontang Barat ;
- 4) Kepala Kelurahan (Lurah) atau Pejabat terkait.

Peneliti selanjutnya menggunakan teknik *snow ball sampling* dimana penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi apabila dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data sehingga sampel informan yang dipilih selanjutnya yaitu Ketua RT dan masyarakat yang ada di wilayah RT.

b. Data Sekunder

Sumber informasi kedua dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan program lima puluh juta per RT setiap 6 RT mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hasil pelaksanaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui buku – buku dan sumber bacaan lainnya serta dari media cetak.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan atau disebut sebagai data primer. Penelitian lapangan terdiri dari :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan tetap (*Constant Comparative Method*) yang dikembangkan oleh Moleong (2008 : 288). Adapun alur dalam model perbandingan tetap (Moleong 2008 : 288-289) adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

b. Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan, setiap kategori diberi nama yang disebut 'label'.

c. Sintesisasi

Mensintesisasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.

d. Menyusun 'Hipotesis kerja'

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data). Hipotesis kerja hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis dan Pembahasan

Pada bagian ini akan membahas tentang pelaksanaan program Rp 50 juta per RT (Prolita) di Kota Bontang sesuai fokus penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan penilaian prolita. Kemudian peneliti akan membandingkan pelaksanaan Prolita di tiga Kecamatan.

Persiapan Prolita

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat atau Prolita. Dimana akan menjadi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) bagi masing-masing tiap kelurahan di area Pemerintah Kota Bontang dalam merencanakan berbagai kegiatan, yaitu Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat atau Prolita. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan program lima puluh juta per RT adalah dengan melakukan perencanaan berjenjang. Kemudian Persiapan tingkat RT yaitu melakukan sosialisasi Program fasilitasi Partisipasi Masyarakat Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT kepada masyarakat di wilayahnya. Kemudian ketua RT membentuk Tim di tingkat RT dan membuat jadwal/*schedule* rembuk warga bersama masyarakat (sesuai pasal 8). Setelah membuat jadwal rembuk warga, ketua RT melaksanakan kegiatan rembuk

warga bersama warganya untuk melakukan perencanaan kegiatan di wilayahnya, setelah itu menginventarisasi/mendata usulan berdasarkan hasil rembug warga kemudian ketua RT mengisi formulir usulan kegiatan hasil rembug warga berdasarkan urutan prioritas dan membuat berita acara rembug warga yang ditanda tangani oleh ketua RT, sekretaris dan unsur warga yang dilampiri daftar hadir peserta rembug warga (sesuai pasal 17).

Tabel 4.1
Tahap persiapan Prolita di Kota Bontang

Tahap Persiapan	Kecamatan Bontang Selatan	Kecamatan Bontang Utara	Kecamatan Bontang Barat
Rembug Warga	Ada	Ada	Ada
Usulan Kegiatan	Ada	Ada	Ada
Berita Acara	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan tabel diatas tahap persiapan prolita di tiga (3) kecamatan di Kota Bontang yaitu Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat sudah sesuai dengan pedoman dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 tahun 2012. Hanya saja peneliti melihat bahwa dalam tahap persiapan prolita partisipasi masyarakat masih kurang di beberapa wilayah dimana tingkat kehadiran masyarakat dibawah 50% dari jumlah KK (kepala keluarga) yang ada di RT (rukun tetangga) ini dikarenakan peran ketua RT dan koordinasi dari tim Kelurahan berbeda-beda. Merujuk pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 tahun 2012 pasal 2 ayat 2 huruf d bahwa tujuan peraturan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan (lihat di lampiran 4) sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat diutamakan.

Pelaksanaan Prolita

Setelah melalui tahap persiapan kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan Prolita. Pelaksanaan Prolita sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan walikota Nomor 73 tahun 2012, tahapan pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat atau Program Lima Puluh Juta Per RT (prolita) adalah sesuai dengan pasal 17 huruf b setelah ketua RT mengisi formulir usulan kegiatan hasil rembug warga kemudian dibawa ke kelurahan untuk di verifikasi. Kemudian sesuai pasal 18 huruf a, di Kelurahan tim kelurahan menghimpun dan memverifikasi seluruh kegiatan dari Rukun Tetangga (RT) yang ada di wilayahnya, setelah itu tim kelurahan menyusun daftar kegiatan berdasarkan skala prioritas dari seluruh usulan kegiatan RT yang memuat jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. Lalu, tim kelurahan menetapkan daftar rekapitulasi kegiatan, jadwal kegiatan yang akan dilakukan dimasing-

masing RT dan selanjutnya tim kelurahan bersama PPTK menyusun RKA kegiatan di masing-masing wilayah RT.

Tabel 4.2
Tahap pelaksanaan Prolita di Kota Bontang

Tahap Pelaksanaan	Kecamatan Bontang Selatan	Kecamatan Bontang Utara	Kecamatan Bontang Barat
Kegiatan	Kegiatan terlaksana *) sesuai dengan perencanaan hasil rembuk warga dengan mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.	Kegiatan terlaksana *) sesuai dengan perencanaan hasil rembuk warga dengan mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.	Kegiatan terlaksana *) sesuai dengan perencanaan hasil rembuk warga dengan mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.
Dampak	Dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat	Dirasakan oleh sebagian besar masyarakat	Berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat

Berdasarkan tabel diatas tahapan pelaksanaan Prolita di tiga (3) kecamatan Kota Bontang yaitu kecamatan Bontang Selatan, kecamatan Bontang Utara dan kecamatan Bontang Barat dikatakan secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Apabila merujuk pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 tahun 2012 Pasal 2 ayat 2 huruf d bahwa tujuan peraturan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Namun yang terjadi bahwa dalam tahap pelaksanaan prolita sebagian masyarakat dan Ketua RT di Kota Bontang masih menggunakan pihak CV (pihak ketiga) dalam pelaksanaan pembangunannya karena masyarakat sibuk, tidak ingin repot, ingin hasil pembangunan dapat lebih maksimal dan sebagainya. Dalam hal ini prolita merupakan program yang kegiatan dari warga tingkat RT dan pelaksanaannya pun diserahkan kepada RT dan masyarakat semua tergantung bagaimana hasil kesepakatan bersama namun diharapkan partisipasi dan dengan memberdayakan masyarakat tingkat RT sendiri.

Penilaian Prolita

Dalam penilaian Prolita akan dilihat bagaimana perbandingan antara persiapan dan pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan melalui rembuk warga di RT. Kemudian hasil pelaksanaan prolita

dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah adanya Prolita khususnya masyarakat di lingkungan tingkat RT. Apakah dengan adanya Prolita dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan dengan adanya Prolita dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan tingkat RT. Prolita dapat dikatakan berhasil apabila kebutuhan seluruh masyarakat dapat terpenuhi, permasalahan yang ada di lingkungan RT dapat diatasi dan masyarakatnya dapat merasakan dampak dari adanya Prolita tersebut maka Prolita dapat dikatakan berhasil dan layak untuk dilanjutkan.

Tabel 4.3
Penilaian Prolita di Kota Bontang

Kecamatan	Perbandingan		Hasil Pelaksanaan
	Persiapan	Pelaksanaan	
Bontang Selatan	Sesuai) infrastruktur, sosial dan ekonomi	Sesuai) infrastruktur, sosial dan ekonomi	Terlaksana) dampaknya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat
Bontang Utara	Sesuai) infratsruktur, sosial dan ekonomi	Sesuai) infrastruktur, sosial dan ekonomi) dampaknya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat
Bontang Barat	Sesuai) infrastruktur, sosial dan ekonomi	Sesuai) infrastruktur, sosial dan ekonomi) dampaknya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara persiapan dan pelaksanaan Prolita di Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan di tingkat RT sesuai dengan perencanaan dalam rembug warga tingkat RT karena antara persiapan dan pelaksanaan berkaitan satu sama lain. Secara keseluruhan di wilayah Kota Bontang antara persiapan dan pelaksanaan menunjukkan persamaan dimana terdapat kesesuaian antara persiapan dan pelaksanaan prolita. Yang membedakan hanya dalam kegiatannya saja karena kegiatan tersebut berdasarkan hasil usulan kegiatan rembug warga di RT. Selain itu yang membedakan lainnya ialah mekanisme pelaksanaan Prolita yang dilaksanakan di tingkat RT (rukun tetangga) dan juga partisipasi masyarakat yang berbeda-beda setiap wilayah RT di 15 Kelurahan yang ada di Kota Bontang. Dengan demikian bahwa kegiatan Prolita, mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan Prolita di Kota Bontang sulit untuk disamaratakan terfokus pada bidang infratsruktur, sosial dan ekonomi karena harus disesuaikan berdasarkan

hasil rembuk warga dan kondisi lingkungan RT serta kondisi masyarakat di wilayahnya.

Dengan Prolita dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat tingkat RT misalnya semenisasi jalan gang, pembuatan parit/gorong-gorong, kegiatan sosial dan sebagainya. Perencanaan Prolita dimulai dan ditentukan langsung oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan RT kemudian untuk pelaksanaannya masyarakat boleh menentukan sendiri, selain itu kegiatan yang diusulkan telah terlaksana dan Prolita bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan RT khususnya dan masyarakat Kota Bontang pada umumnya.

Kesimpulan

Program Lima Puluh Juta per RT (Prolita) Kota Bontang di enam (6) RT telah terlaksana sesuai dengan pedoman pelaksanaan Prolita dalam Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2012 dan Prolita dapat memecahkan permasalahan pembangunan yang tidak merata khususnya tingkat RT. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan program lima puluh juta per RT (Prolita) di wilayah Kota Bontang mulai dari persiapan sebagai tahap awal penentuan dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat rukun tetangga (RT) dimulai rembuk warga untuk menentukan kegiatan prolita yang akan dilaksanakan di RT telah dijalankan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 tahun 2012. Namun yang terjadi di beberapa RT yang ada di wilayah Kota Bontang partisipasi masyarakat dalam kegiatan rembuk warga masih kurang tergantung bagaimana peran ketua RT dan koordinasi dengan pihak Kelurahan.
2. Pelaksanaan prolita di wilayah kota Bontang sudah sesuai dengan DPA (Daftar Pengguna Anggaran) dengan rentang waktu mulai maret-desember karena pelaksanaannya bertahap dan kegiatannya telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Hanya saja yang terjadi di beberapa wilayah pelaksanaan prolita menyerahkan pelaksanaan pembangunannya dengan menggunakan CV atau pihak ketiga agar hasilnya lebih maksimal dan karena kondisi masyarakatnya yang sibuk dan sebagainya. Selain itu, kegiatan Prolita di RT yang wilayahnya terlalu luas dan jumlah KK yang banyak pelaksanaannya sulit merata.
3. Dalam hal penilaian prolita, perbandingan pelaksanaan Prolita di Kota Bontang secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan dalam artian antara persiapan dan pelaksanaan sudah menunjukkan persamaan sesuai dengan yang direncanakan. Perbedaan terjadi dalam kegiatan yang dilaksanakan di setiap RT, mekanisme pelaksanaan prolita dan partisipasi masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah RT di 15 Kelurahan. Sehingga kegiatan, mekanisme pelaksanaan

pembangunan kegiatan prolita sulit untuk disamaratakan antara wilayah satu dengan yang lain karena harus disesuaikan dengan lingkungan RT dan kondisi masyarakatnya. Begitupun partisipasi masih minim disebabkan kurangnya peran ketua RT dan pihak kelurahan tidak sepenuhnya mengexpose bentuk partisipasi masyarakat yang ada di wilayahnya.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan prolita di Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Karena persiapan prolita dalam kegiatan rebug warga partisipasi masyarakat masih kurang dikarenakan masih ada ketua RT yang kurang aktif dalam meningkatkan peran serta masyarakat padahal dalam hal ini peran RT sangat penting, maka seharusnya :
 - a. Ketua RT mengajak masyarakatnya melalui pendekatan mulai dari turun langsung mengundang masyarakat atau melalui pendekatan dengan rutin mengadakan rapat RT dalam rangka saling *sharing* mengenai apa saja tentang RT.
 - b. Ketua RT dalam menyampaikan kepada masyarakat mengenai prolita bagaimana pengelolaannya dan transparansi anggarannya untuk menyamakan persepsi di kalangan masyarakat.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan prolita yang dalam pengerjaan prolita sering menggunakan CV atau pihak ketiga maka alangkah lebih baiknya jika partisipasi masyarakatlah yang lebih diutamakan Selain itu karena pelaksanaan kegiatan prolita di RT yang wilayahnya terlalu luas tidak merata, maka seharusnya dilakukan pemekaran wilayah RT sehingga kegiatan prolita dapat merata dan maksimal.
3. Sehubungan dengan laporan hasil perkembangan pelaksanaan prolita di Kota Bontang banyak kelurahan yang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Prolita hanya 4 (empat) Kelurahan dari 15 (lima belas) Kelurahan yang ada di Kota Bontang bukan karena masyarakatnya tidak berpartisipasi melainkan karena pihak Kelurahan tidak *mengexpose* partisipasi masyarakat, maka seharusnya sekecil apapun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Prolita sebaiknya di sampaikan.
4. Secara keseluruhan pelaksanaan Prolita di Kota Bontang telah menunjukkan hasil yang cukup bagus dan dapat dikatakan berhasil, Pemerintah Kota Bontang harus terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Prolita terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan maupun ketika pelaksanaan kegiatan Prolita itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baratakusumah, Supriyadi, Deddy & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Deddy T. Tikson. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, M Irfan. 1999. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarnaen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalannya)*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70.
- Purwanto, Erwan Agus. Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharsimi, Arikunto. Safruddin, Cepi. Abdul, Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan*. Edisi Kedua. 2009.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberikan Rakyat*. Refika Aditama.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Persadi, Ujung Pandang.
- Widodo, M.S, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Yusuf Faridah, Tayib Napis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Renika Cipta.

Dokumen :

Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Sumber Internet:

www. google.com (diakses tanggal 28 Agustus 2015)